



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK PUTUS PERMOHONAN UJI KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN OLEH PARTAI UMMAT

Jakarta, 29 Maret 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap perkara Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Selasa (29/3) pukul 9.30 WIB. Permohonan diajukan oleh Partai Ummat yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yaitu Ridho Rahmadi dan A. Muhajir, dan diregistrasi MK dengan nomor perkara 11/PUU-XX/2022. Adapun sidang dengan agenda Pengucapan Putusan ini juga akan digelar MK terhadap 9 (sembilan) perkara lainnya.

Sebelumnya, Partai Ummat mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 222 UU *a quo*, yang menyatakan:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pada permohonan awal, dijelaskan bahwa Pemohon menganggap pencalonan presiden secara yuridis merupakan hak konstitusional partai politik. Sehingga, berlakunya Pasal 222 UU Pemilu dinilai Pemohon telah mengakibatkan pengabaian hak konstitusional Partai Ummat yang memiliki fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat dalam mengajukan calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Pemohon juga menyebutkan bahwa konstitusionalitas ketentuan *a quo* telah diuji MK berkali-kali dengan putusan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk itu, Pemohon menguraikan seluruh dalil permohonan serta pertimbangan dan putusan MK terdahulu terhadap seluruh perkara pengujian norma yang sama.

Menanggapi permohonan Pemohon, MK meminta Pemohon memisahkan dalil mengenai keberlakuan Pasal 62 UU MK yang mengatur tentang Pengujian Kembali, dari bagian kedudukan hukum Pemohon. MK juga meminta klarifikasi dari Pemohon mengenai verifikasi Pemohon sebagai partai politik baik secara administratif maupun secara faktual karena akan menjadi pertimbangan MK dalam kaitan dengan kedudukan hukum Pemohon. Secara kualitatif, permohonan Pemohon dipandang MK telah memnuhi sistematika dan membangun argumentasi.

Sebelum memutus, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap perkara *a quo* pada Selasa (22/2) lalu. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)